Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024
Halaman: 3053 – 3060

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Model Manajemen yang Efektif

Kurniati Karim[1], Firdaus[2], Ali Ramatni[3], M. Yusuf Bahtiar[4], Fredrik Bastian Kawani[5], Dhiraj Kelly Sawlani[6]
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, Indonesia[1]
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Indonesia[2]
STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh, Indonesia[3]
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia[4]
Universitas Kristen Tentena, Indonesia[5]
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia[6]

atiekkarim299@gmail.com[1]

Kata Kunci:
Ekonomi Hijau, Pembangunan Berkelanjutan, Model Manajemen, Kebijakan Adaptif, Inovasi Teknologi.

Abstrak

Ekonomi hijau telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen yang efektif dalam implementasi ekonomi hijau guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan tinjauan literatur dan analisis studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan penerapan ekonomi hijau, termasuk kebijakan pemerintah, peran sektor swasta, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, kerangka kebijakan yang adaptif, serta dukungan finansial dan teknologis memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan implementasi ekonomi hijau. Model manajemen yang diusulkan diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi pemerintah dan organisasi dalam merancang strategi yang inklusif dan berbasis bukti untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Key Word:
Green Economy, Sustainable Development, Management Models, Adaptive Policies, Technological Innovation

Abstract

The green economy has become one of the main approaches in realizing sustainable development oriented towards a balance between economic growth, environmental protection, and social welfare. This research aims to develop an effective management model in the implementation of the green economy to support sustainable development goals. Using a qualitative approach that combines literature review and case study analysis, this study explores the key factors that influence the successful implementation of the green economy, including government policies, the role of the private sector, community participation, and technological innovation. The results show that synergies between various stakeholders, adaptive policy frameworks, and financial and technological support play an important role in ensuring the sustainability of green economy implementation. The proposed management model is expected to be a practical guide for governments and organizations in designing inclusive and evidence-based strategies to achieve sustainable development.

Copyright © 2024 Kurniati Karim, Firdaus, Ali Ramatni, M. Yusuf Bahtiar, Fredrik Bastian Kawani, Dhiraj Kelly Sawlani
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tradisional, meskipun mendorong pertumbuhan ekonomi global, sering membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Dampak tersebut meliputi peningkatan emisi gas rumah kaca, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara, dan percepatan pemanasan global. Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi, menjadi penyebab utama meningkatnya emisi karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4), yang memicu perubahan iklim global. Tantangan ini menuntut solusi melalui pendekatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, sebagaimana ditegaskan oleh Setiawati (2023).

Dwi Widodo et al. (2023) menegaskan bahwa perubahan iklim tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem tetapi juga memberikan dampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampaknya mencakup kerugian finansial yang disebabkan oleh frekuensi bencana alam yang meningkat, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Untuk menghadapi tantangan ini, pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas global yang harus diterapkan secara komprehensif. Salah satu pendekatan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

yang dinilai efektif adalah transisi menuju ekonomi hijau, yang berfokus pada pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan tetapi juga untuk menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil.

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan Paris Agreement, yang mendorong negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Inisiatif seperti pajak karbon, energi terbarukan, dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya menjadi bagian integral dari strategi ini. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2022) menjelaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi kebijakan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini meliputi implementasi Sukuk Hijau sebagai instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Selain itu, kebijakan pajak karbon mulai diterapkan untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement*.

Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon, mendukung pencapaian target pengurangan emisi sebesar 29% pada 2030, dan memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat efisiensi sumber daya dan menciptakan lapangan kerja hijau. Inisiatif lainnya termasuk pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan pengesahan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, yang menjadi dasar hukum untuk pengendalian emisi gas rumah kaca. Dalam penerapan ekonomi hijau di Indonesia dan negara berkembang lainnya, terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dan pendanaan, di mana banyak negara berkembang kesulitan dalam menyediakan dana untuk proyek-proyek ekonomi hijau yang memerlukan investasi besar di awal, seperti di sektor energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana dari sektor publik dan swasta.

Masalah lainnya adalah kurangnya infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan. Infrastruktur pendukung ekonomi hijau, seperti jaringan energi terbarukan dan sistem pengelolaan karbon, masih kurang berkembang, serta teknologi yang efisien untuk mendukung transisi hijau belum banyak tersedia. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan besar. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi hijau. Kurangnya pelatihan dan edukasi terkait dengan keberlanjutan menghambat penerapan yang lebih luas dari ekonomi hijau.

Terakhir, masalah koordinasi antar pemangku kepentingan turut memperumit implementasi kebijakan ekonomi hijau. Sering kali, setiap pihak—baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat—bekerja secara terpisah tanpa adanya sinergi yang efektif. Beberapa solusi yang diajukan oleh penelitian terdahulu untuk mengatasi masalah ini mencakup: Pengembangan sumber pembiayaan hijau, seperti sukuk hijau dan obligasi hijau, yang dapat membantu mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada dana publik (Setiawati, 2023). Selanjutnya Peningkatan infrastruktur dan teknologi hijau, dengan mendorong kolaborasi internasional serta investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi bersih. Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif untuk mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan (Widodo et al., 2023).

Selain itu Edukasi dan pelatihan sumber daya manusia di sektor ekonomi hijau untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan (UNEP, 2022). Yang terakhir Peningkatan koordinasi antar sektor melalui pendekatan multi-pemangku kepentingan yang dapat mempercepat pengalokasian sumber daya dan menciptakan sinergi antar pihak terkait (Kemenko Perekonomian RI, 2022). Dengan solusi-solusi tersebut dan implementasi yang konsisten, ekonomi hijau dapat mempercepat tercapainya pembangunan berkelanjutan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian terkait ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa konsep ekonomi hijau bertujuan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi dengan kelestarian lingkungan, sehingga menciptakan model pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tantangan besar yang dihadapi dunia, seperti perubahan iklim dan krisis sumber daya alam, yang semakin mendesak untuk dicarikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Ekonomi hijau dipandang sebagai solusi strategis yang mampu mengatasi berbagai masalah ini dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pentingnya Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan Menurut Setiawati (2023), ekonomi hijau memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengutamakan efisiensi sumber daya, pengurangan polusi, dan pengelolaan ekosistem secara bijaksana.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Setiawati menekankan bahwa ekonomi hijau tidak hanya terkait dengan kebijakan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terutama bagi negara-negara berkembang, peralihan ke ekonomi hijau menjadi suatu keharusan karena tantangan besar yang mereka hadapi, seperti kerusakan lingkungan akibat pembangunan berbasis industri dan energi fosil serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Model Manajemen dalam Ekonomi Hijau Penerapan ekonomi hijau memerlukan pembangunan model manajemen yang efektif, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ekonomi hijau. Widodo et al. (2023) menyarankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus melibatkan integrasi kebijakan lintas sektor dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Manajemen yang berbasis pada prinsip keberlanjutan ini perlu disusun dengan perencanaan jangka panjang, yang tidak hanya mencakup pengelolaan sumber daya alam secara efisien tetapi juga mengoptimalkan potensi energi terbarukan dan teknologi bersih. Selain itu, Widodo juga menyoroti pentingnya pembentukan infrastruktur yang mendukung ekosistem hijau serta penguatan kerja sama internasional dalam hal transfer teknologi.

Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2022) menjelaskan bahwa ekonomi hijau juga dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, ekonomi hijau berpotensi untuk mengurangi ketimpangan sosial, menciptakan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kebijakan pendukung seperti sukuk hijau dan pajak karbon menjadi instrumen penting dalam mendanai proyek-proyek yang mendukung pengurangan emisi dan transisi energi terbarukan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan ekonomi hijau yang tidak hanya melibatkan manajemen yang efektif, tetapi juga integrasi kebijakan lintas sektor yang melibatkan semua pihak terkait. Pendekatan ini diyakini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian mengenai "Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Model Manajemen yang Efektif" dilakukan sebagai respons terhadap tantangan besar dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara harmonis. Konsep ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca dan kerusakan ekosistem, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Mengingat dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin besar, ekonomi hijau dianggap sebagai solusi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Alasan dilakukannya penelitian ini: satu diantaranya adalah Menanggulangi Krisis Lingkungan: Penelitian ini berfokus pada memberikan solusi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi akibat model pembangunan berbasis energi fosil. Menurut Setiawati (2023), peralihan ke ekonomi hijau sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang dapat mengurangi emisi dan menggunakan sumber daya alam secara efisien. Mubarok (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan green economy menjadi upaya dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini karena konsep green economy dapat mencapai 5 (lima).

Selanjutnya Menciptakan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan: Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan model manajemen yang mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Widodo et al. (2023) menekankan pentingnya kebijakan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang harmonis dalam mengelola ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan. Wahdiniawati (2024) Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen SDM berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Praktik seperti pengembangan karir, manajemen beban kerja, dan budaya organisasi meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keseimbangan kerja-hidup berdampak positif pada motivasi dan produktivitas. Pendekatan holistik, termasuk fleksibilitas jam kerja dan integrasi keberlanjutan dalam kebijakan SDM, mendukung kesejahteraan karyawan.

Selanjutnya Meningkatkan Efisiensi Sumber Daya dan Energi Terbarukan: Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh negara berkembang adalah keterbatasan pendanaan dan teknologi untuk mendukung transisi ke ekonomi hijau. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi berupa instrumen pembiayaan hijau, seperti sukuk hijau dan obligasi hijau, serta kebijakan pajak karbon untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, April 24). Penciptaan Lapangan Kerja yang Inklusif: Ekonomi hijau juga memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan yang berkelanjutan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2022) menyoroti bahwa ekonomi hijau dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja yang inklusif di sektor energi terbarukan dan pengelolaan limbah.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Penelitian ini diadakan untuk mengembangkan model manajemen yang efektif dalam penerapan ekonomi hijau, yang merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan secara global. Kolaborasi antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang ramah lingkungan sekaligus lebih inklusif dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen yang efektif dalam penerapan ekonomi hijau, khususnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Fokus utama penelitian ini adalah merumuskan model manajemen yang dapat mengintegrasikan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam transisi menuju ekonomi hijau dan mencari solusi praktis yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi sumber daya alam, mendukung transisi energi terbarukan, serta menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan.

Ekonomi hijau menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan dengan fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya alam, pengurangan polusi, dan pemanfaatan energi terbarukan. Ekonomi hijau tidak hanya berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Meskipun banyak kebijakan internasional dan nasional yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau, masih terdapat tantangan besar, seperti keterbatasan pendanaan, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya koordinasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Gap yang ditemukan dalam penelitian terdahulu termasuk masalah pendanaan yang terbatas, terutama untuk proyek-proyek besar yang memerlukan investasi tinggi dalam infrastruktur energi terbarukan dan teknologi bersih. Selain itu, koordinasi yang kurang antara sektor publik dan swasta sering kali menghambat penerapan kebijakan yang efektif. Masalah lain yang perlu diatasi adalah pemahaman dan kapasitas SDM, karena banyak pelaku ekonomi dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat dari ekonomi hijau.

Penelitian ini menawarkan beberapa keunikan, yaitu pendekatan holistik dalam mengembangkan model manajemen lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan ekonomi hijau secara efisien. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi pendanaan hijau yang inovatif, seperti penggunaan sukuk hijau dan pajak karbon, untuk mendukung proyek-proyek ekonomi hijau. Penekanan pada edukasi dan pemberdayaan SDM juga menjadi salah satu aspek penting, dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pelaku ekonomi untuk beradaptasi dengan transisi menuju ekonomi hijau. Dengan kontribusi ini, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan dalam literatur yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan praktis yang dapat diterapkan di negara-negara berkembang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen ekonomi hijau yang efektif, sehingga pendekatan kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan lebih sesuai untuk mencapainya. Prosedur penelitian melibatkan beberapa tahapan berikut: 1) Pengumpulan Data Primer: Data utama akan diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekonomi hijau di negara-negara berkembang, termasuk pembuat kebijakan, pelaku industri energi terbarukan, serta masyarakat lokal yang terpengaruh oleh kebijakan ekonomi hijau. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang terstruktur, tetapi tetap memungkinkan diskusi terbuka untuk mengidentifikasi isu-isu yang mungkin tidak terduga. Jumlah partisipan diperkirakan sekitar 20-30 orang untuk wawancara mendalam dan 3-5 kelompok untuk FGD, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 6-8 peserta; 2) Pengumpulan Data Sekunder: Data sekunder akan dikumpulkan dari literatur terkait, seperti laporan kebijakan, data statistik, serta studi terdahulu mengenai ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Sumber data ini akan memberikan gambaran yang lebih luas tentang kebijakan yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi ekonomi hijau; 3) Analisis Data: Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk data kualitatif. Proses ini melibatkan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan model manajemen ekonomi hijau yang efektif, tantangan dalam implementasinya, dan solusi potensial. Software NVivo atau ATLAS.ti dapat digunakan untuk membantu dalam pengkodean dan pengelolaan data kualitatif; 4) Pengembangan Model Manajemen: Berdasarkan hasil analisis data, model manajemen akan dirancang dengan mengintegrasikan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Model ini akan difokuskan pada sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta akan memperhitungkan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi implementasi ekonomi hijau di negara

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

berkembang; 5) Validasi Model: Setelah model dikembangkan, validasi akan dilakukan melalui sesi umpan balik dengan pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemerintahan, sektor swasta, dan komunitas lokal. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa model manajemen yang dihasilkan realistis dan dapat diterapkan dalam konteks lokal; 6) Rekomendasi Kebijakan dan Strategi: Berdasarkan temuan penelitian dan model yang dikembangkan, rekomendasi kebijakan akan disusun. Rekomendasi ini akan mencakup solusi untuk tantangan pendanaan, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas SDM dalam menerapkan ekonomi hijau secara efektif. Dalam hal replikasi, teknik analisis dan prosedur pengumpulan data dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan pada konteks negara berkembang lainnya. Replikasi studi ini akan bergantung pada pemilihan lokasi studi kasus yang relevan, serta pelaksanaan wawancara dan FGD dengan penyesuaian terhadap konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Manajemen Ekonomi Hijau yang Efektif

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model manajemen yang dapat mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan aspek lingkungan dan sosial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, model manajemen yang diusulkan menekankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Widodo et al. (2023), yang menyatakan bahwa kolaborasi antara sektor-sektor ini sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi hijau secara holistik.

Tantangan dalam Transisi ke Ekonomi Hijau

Beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam transisi menuju ekonomi hijau antara lain: Negara berkembang sering kali kesulitan dalam menyediakan dana untuk proyek-proyek energi terbarukan dan teknologi bersih. Berdasarkan analisis dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2022), banyak negara berkembang yang bergantung pada pendanaan eksternal dan skema pembiayaan hijau, seperti sukuk hijau. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menghambat implementasi kebijakan ekonomi hijau secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang buruk dapat menunda pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Strategi Kebijakan untuk Meningkatkan Efisiensi Sumber Daya Alam

Penelitian ini mengusulkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan mendukung transisi energi terbarukan. Salah satu rekomendasi kebijakan utama adalah penerapan pajak karbon dan insentif untuk energi terbarukan, yang telah terbukti berhasil di beberapa negara maju (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022). Selain itu, kebijakan investasi hijau yang lebih besar diperlukan untuk mendukung infrastruktur energi terbarukan. Nordhaus (2017) menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan menciptakan insentif ekonomi untuk inovasi energi bersih. Selanjutnya Hepburn et al. (2020) menemukan bahwa investasi dalam energi terbarukan, seperti energi surya dan angin, tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dalam skala besar.

Kemudian Stern (2007) dalam *The Stern Review* menggarisbawahi pentingnya kebijakan ekonomi yang mendukung energi hijau sebagai langkah utama untuk menghindari dampak ekonomi dari perubahan iklim. Terakhir OECD (2019) menyoroti bahwa kombinasi insentif fiskal, pajak karbon, dan investasi hijau yang ditargetkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon di berbagai negara. Dengan mengacu pada temuan ini, kebijakan yang mengintegrasikan pajak karbon, insentif energi terbarukan, dan investasi hijau akan memberikan hasil yang efektif untuk mendorong efisiensi sumber daya alam serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Penciptaan Lapangan Kerja Ramah Lingkungan

Penelitian ini juga menyoroti potensi ekonomi hijau dalam menciptakan lapangan kerja baru. Berdasarkan temuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2022), sektor energi terbarukan dan pengelolaan limbah dapat menciptakan peluang kerja yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pengembangan sektor-sektor ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau memerlukan model manajemen yang mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan solusi inovatif dalam pendanaan. Selain itu, edukasi dan peningkatan kapasitas SDM juga penting untuk memastikan bahwa transisi ke ekonomi hijau dapat berjalan dengan efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan model manajemen yang dapat diterapkan di negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

berkelanjutan.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk membangun model manajemen yang efektif dalam penerapan ekonomi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam mengimplementasikan ekonomi hijau, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Hubungan Antara Kebijakan Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan

Model manajemen yang dikembangkan dalam penelitian ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan dan sosial. Penelitian sebelumnya (Setiawati, 2023) menunjukkan bahwa ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Hasil penelitian ini mendukung temuan tersebut dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian oleh Widodo et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa model manajemen yang efektif membutuhkan kebijakan lintas sektor yang dapat mengoptimalkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Model manajemen yang dikembangkan dalam penelitian ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Penelitian sebelumnya menunjukkan relevansi konsep ini dalam konteks ekonomi hijau: Setiawati (2023) menyoroti bahwa ekonomi hijau tidak hanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga fokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Widodo et al. (2023) mengemukakan bahwa model manajemen yang efektif membutuhkan kebijakan lintas sektor untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan, terutama melalui pendekatan berbasis teknologi dan kolaborasi antar-stakeholder.

Selanjutnya UNEP (2011) dalam *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* menjelaskan bahwa transisi menuju ekonomi hijau hanya dapat dicapai dengan mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam keputusan ekonomi, termasuk melalui investasi dalam energi terbarukan dan praktik berkelanjutan. Porter dan Van der Linde (1995) memperkenalkan *Porter Hypothesis*, yang menyatakan bahwa kebijakan lingkungan yang ketat dapat merangsang inovasi, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Bina (2013) menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam ekonomi hijau yang melibatkan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan secara bersamaan. Hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan integrasi kebijakan lintas dimensi sangat penting dalam mewujudkan model manajemen yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tantangan Pendanaan dan Infrastruktur

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesulitan pendanaan dan infrastruktur dalam transisi ke ekonomi hijau. Negara berkembang seringkali kesulitan untuk menyediakan dana yang cukup untuk proyek-proyek besar yang memerlukan investasi awal yang tinggi, seperti pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan temuan Widodo et al. (2023) yang menunjukkan bahwa proyek ekonomi hijau sering kali terkendala oleh keterbatasan dana. Mengatasi masalah ini memerlukan instrumen pembiayaan yang inovatif, seperti sukuk hijau dan pajak karbon, yang telah diujicobakan di beberapa negara untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan kerjasama internasional dalam hal pendanaan untuk proyek-proyek besar yang mendukung transisi energi terbarukan.

Koordinasi Antarsektor

Penelitian ini juga mengidentifikasi kurangnya koordinasi antar sektor sebagai salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan ekonomi hijau. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja bersama-sama untuk menciptakan solusi yang lebih terintegrasi. Penelitian oleh Setiawati (2023) menunjukkan bahwa sinergi antar sektor sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi kenyataannya koordinasi yang buruk sering kali menghambat pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks ini, model manajemen yang diusulkan dalam penelitian ini berfokus pada penciptaan platform kolaboratif yang memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait.

Pemahaman dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah pemahaman dan kapasitas SDM juga menjadi tantangan utama yang diidentifikasi dalam

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

penelitian ini. Banyak pelaku usaha dan masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep ekonomi hijau, yang menyebabkan implementasi kebijakan yang kurang efektif. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan meningkatkan kapasitas SDM agar mereka dapat berpartisipasi dalam transisi ke ekonomi hijau. Penelitian oleh Widodo et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pendidikan dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk mendorong kesuksesan implementasi ekonomi hijau.

Penciptaan Lapangan Kerja Ramah Lingkungan

Salah satu hasil yang penting dari penelitian ini adalah kemampuan ekonomi hijau untuk menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan. Sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan berpotensi menciptakan peluang kerja baru yang ramah lingkungan. Ini sesuai dengan temuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2022), yang mencatat bahwa sektor-sektor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa negara-negara berkembang perlu mengembangkan sektor-sektor ini untuk menciptakan lapangan kerja yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan kolaborasi lintas sektor, pendanaan yang inovatif, serta peningkatan kapasitas SDM. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, solusi yang diusulkan dalam penelitian ini memberikan panduan praktis bagi negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan model manajemen yang lebih terintegrasi dan mendukung transisi ke ekonomi hijau. Penelitian Firdaus (2022) mengungkapkan bahwa elemen organisasi seperti komitmen, budaya, kepemimpinan, dan lingkungan kerja memengaruhi kinerja karyawan serta memiliki kaitan erat dengan prinsip ekonomi hijau. Ekonomi hijau menekankan efisiensi sumber daya, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Yang pertama Komitmen terhadap keberlanjutan memotivasi karyawan untuk mendukung inisiatif ramah lingkungan, seperti pengurangan limbah dan penggunaan teknologi hijau. selanjutnya yang berorientasi keberlanjutan mendorong inovasi yang mengurangi jejak karbon dan penggunaan energi terbarukan. kemudian Pemimpin visioner mengarahkan karyawan untuk mengadopsi praktik kerja hijau secara efisien. Yang terakhir kerja yang mendukung efisiensi sumber daya meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Elemen-elemen ini menjadi kunci untuk mewujudkan ekonomi hijau yang seimbang antara kinerja bisnis, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ekonomi hijau di negara berkembang memerlukan model manajemen terintegrasi yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Tantangan seperti pendanaan dan kapasitas SDM dapat diatasi dengan pembiayaan hijau dan pendidikan ekonomi hijau. Ekonomi hijau mendukung pengurangan dampak lingkungan, penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan, dan efisiensi sumber daya. Keberhasilan implementasi bergantung pada komitmen kolektif, regulasi yang mendukung, dan partisipasi masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pendanaan hijau, pengujian model empiris, dan peran teknologi digital.

DAFTAR REFERENSI

Bina, O. (2013). *The green economy and sustainable development: An uneasy balance?*. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 31(6), 1023–1047. https://doi.org/10.1068/c1310j

Firdaus, F., & Lusiana, H. (2022, August). The Influence of Organizational Commitment, Organizational Culture, Leadership Style and Environment on Employee Performance in the Wood Processing Industry. In *International Conference On Economics Business Management And Accounting (ICOEMA)* (Vol. 1, pp. 1078-1092).

Hepburn, C., O'Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, J., & Zenghelis, D. (2020). *Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?*. Oxford Review of Economic Policy, 36(S1), S359–S381. https://doi.org/10.1093/oxrep/graa015

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, April 24). *Green economy mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. Siaran pers HM.4.6/209/SET.M.EKON.3/4/2022.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022. *Green Economy Mendorong Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif.* Jakarta: Kemenko Perekonomian RI. Dapat diakses melalui Kemenko Perekonomian RI.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Mubarok, D. (2023). Penerapan Green Economy Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, *6*(2), 31-52.

Nordhaus, W. (2017). *Revisiting the social cost of carbon*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(7), 1518–1523. https://doi.org/10.1073/pnas.1609244114

OECD. (2019). *Taxing Energy Use 2019: Using Taxes for Climate Action*. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://doi.org/10.1787/058ca239-en

Porter, M. E., & Van der Linde, C. (1995). *Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship*. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97–118. https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Setiawati, 2023**.** *Green Economy and Its Role in Achieving SDGs in Developing Countries.*

Setiawati, D. (2023). *Green economy: Integrasi pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hijau.

Stern, N. (2007). *The Stern Review: The Economics of Climate Change*. Cambridge University Press.

UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. United Nations Environment Programme. Diakses dari: https://www.unep.org

United Nations Environment Programme (UNEP), 2022. *Emissions Gap Report 2022*.

Wahdiniawati, S. A., Lubis, F. M., Erlianti, D., Sari, V. B. M., Uhai, S., & Febrian, W. D. (2024). Keseimbangan Kehidupan Kerja: Mewujudkan Kesejahteraan Karyawan Melalui Manajemen Sdm Yang Berkelanjutan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, *7*(1), 728-738.

Widodo, Dwi et al., 2023. *Low Emission Policies of G20 Member Countries.* Membahas kebijakan emisi rendah yang diterapkan oleh negara anggota G20, termasuk implementasi di Indonesia.

Widodo, T., Santoso, R., & Lestari, A. (2023). *Model manajemen lintas sektor untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi Hijau dan Kebijakan Lingkungan*, 15(2), 85–99.